



**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KEMIRI KECAMATAN
PANTI KABUPATEN JEMBER**

*The Role Of Village Owned Business Agencies In Improving Community Welfare
In Kemiri Village Kecamatan Panti Jember District*

SKRIPSI

Oleh:

Andri Novianto
NIM 130910201056

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KEMIRI KECAMATAN
PANTI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Administrasi Negara
dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh:

Andri Novianto
NIM 130910201056

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Penulis dengan penuh bangga menyelesaikan dan mempersembahkan karya ini untuk:

1. Ibunda Siati Ayahanda Nurhadi dan keluarga yang selalu menjadi rumah saya pulang. Tempat mengadu saat tak ada lagi orang yang bisa saya andalkan,
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan pemahaman,
3. Almamater tercinta Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh”

(Terjemahan QS. Al-Insyirah 6: 49)¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm 49

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Andri Novianto

NIM : 130910201056

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Mei 2020

Yang menyatakan,

Andri Novianto
NIM 130910201056

HALAMAN PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KEMIRI KECAMATAN
PANTI KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Andri Novianto
NIM 130910201056

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Abul Haris Suryo N., S.IP, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember” karya Andri Novianto telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 28 Oktober 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP 195805101987022001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si
NIP 197003221995122001

Abul Haris S N, S.IP, M.Si
NIP 198210292015041001

Anggota I

Anggota II

Hermanto Rohman, S.Sos, MPA
NIP 197903032005011001

Dr. Anwar, M.Si
NIP 196306061988021001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si
NIP 196002191987021001

RINGKASAN

Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember; Andri Novianto, 130910201056; 2020: 86 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Desa Kemiri merupakan salah satu desa di kecamatan Panti dengan jumlah masyarakat miskin tertinggi kedua setelah desa Pakis, yaitu sebesar 3.388 penduduk pada tahun 2016. Namun apabila membandingkan antara desa Pakis dan desa Kemiri, adanya BUMDes di desa Kemiri daripada di desa lain dapat disebabkan karena faktor pendukung lainnya, seperti kesadaran masyarakat untuk berorganisasi, adanya potensi di lokasi tersebut dan kualitas SDM di suatu tempat. Dari laporan yang dikeluarkan oleh BPS (2016) menunjukkan hal yang mempengaruhi pemilihan desa Kemiri sebagai desa dengan BUMDes adalah faktor SDM yang cukup memadai.

Hal ini dibuktikan dengan membandingkan jumlah adanya tempat dan sarana pendidikan berupa SD hingga SMA sekaligus tenaga pengajar yang tersedia, desa Pakis menempati urutan terakhir untuk ini (sangat minim dan bahkan tidak terdapat tenaga pengajar dari tingkat SMP di desa ini) sehingga dapat diambil asumsi bahwa SDM di desa Pakis belum memadai untuk terlaksananya BUMDes, sehingga yang menjadi role model atau contoh untuk pembuatan BUMDes adalah desa dengan kondisi sosial termiskin kedua di Kecamatan Panti, yakni Desa Kemiri, selain itu adanya potensi desa dalam bentuk ketersediaan sumber air yang perlu untuk dikonservasi lewat adanya BUMDes memperkuat alasan bahwa memang desa Kemiri memerlukan BUMDes.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan BUM Desa Kembang Desa Kemiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember diwujudkan dengan perannya sebagai fasilitator, motivator, mediator dan juga sebagai stabilisator. Peranan BUM Desa Kembang sebagai Fasilitator yang diwujudkan dengan memberikan fasilitas untuk segala aktivitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Salah satu bentuk fasilitasi kegiatan BUM Desa adalah dengan menyediakan modal untuk membiayai kegiatan operasional BUM Desa Kembang.

Peranan yang kedua adalah Peranan BUM Desa Kembang Desa Kemiri sebagai mediator yakni BUMDes sebagai mediator dalam perencanaan badan usaha adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana usaha yang sudah ditetapkan BUMDes tersebut, dan juga membantu pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa tanpa dengan memutuskan masalah itu.guna meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes Desa Kemiri mensosialisasikan hasil rancangan yang akan dilaksanakan kedepannya. Peranan BUM Desa Kembang sebagai motivator, peranan BUMDes sebagai motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir badan usaha untuk memotivasi masyarakat, pemerintah desa untuk lebih membuka wawasan untuk bagaimana memberikan masukan tentang badan usaha Desa Kemiri kedepannya. Peranan BUM Desa Kembang yang keempat adalah sebagai Stabilisator Keberadaan BUMDes membawa perubahan yang signifikan dibidang ekonomi dan juga sosial. Pergeseran nilai sosial dan juga perubahan pola interaksi antar warga akan terjadi. BUMDes memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa, namun pendapatan ini tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tiga indikator yaitu keadilan social, keadilan ekonomi dan keadilan demokrasi. Keadilan social berkaitan dengan akses masyarakat Desa Kemiri terhadap air bersih, yang mana sebelum adanya BUM Desa belum dikelola dengan baik sehingga mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Namun setelah adanya BUM Desa dibentuklah unit usaha HIPAM guna memfasilitasi masyarakat Desa Kemiri. Keadilan

Ekonomi berkaitan dengan kontribusi BUM Desa terhadap pendapatan asli Desa Kemiri. Sedangkan keadilan deokrasi berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BUM Desa Kembang. Selain itu juga berhubungan dengan kebebasan masyarakat Desa Kemiri untuk menyampaikan aspirasinya untuk turut serta membantu membangun BUM Desa agar lebih baik.



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

- 1) Drs. Djoko Poernomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan IlmuPolitik
- 2) Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial Dan IlmuPolitik
- 3) Ibu Dr. Selfi Budi Heliastuti, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Bapak Abul Haris Suryo N., S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsiini;
- 4) Dosen-dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasJember;
- 5) Bapak Mulyono selaku operator Program studi Ilmu Administrasi Negara
- 6) Ibunda Siati dan ayahanda Nurhadi, yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
- 7) Seluruh narasumber yang telah membantu penulis menghimpun data yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
- 8) Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2013 terima kasih telah memberikan ruang diskusi dan belajar bersama selama ini;
- 9) Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan kedepannya.

Jember, 21 Mei 2020
Yang menyatakan,

Andri Novianto
NIM 130910201056

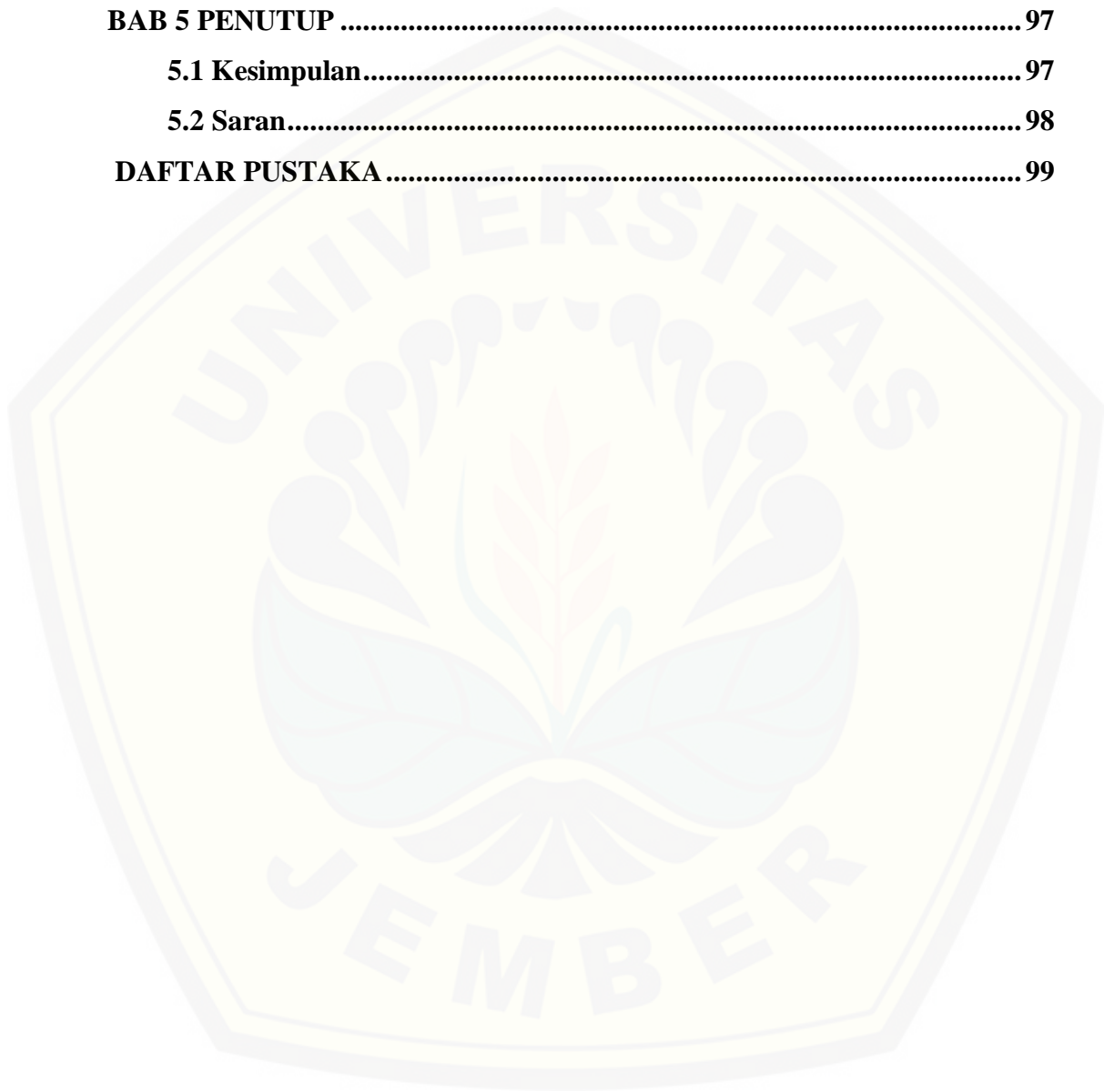


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	xv
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Administrasi Publik.....	13
2.1.1 <i>Old Public Management</i>	14
2.1.2 <i>New Public Management</i>	15
2.1.3 <i>New Public Service</i>	16
2.2 Organisasi Publik.....	18
2.2.1 BUMN.....	21
2.2.2 BUMD.....	21
2.3 BUMDes	23
2.4 Peranan BUM Desa	33
2.5 Kesejahteraan	33
2.6 Kerangka Berpikir.....	36
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	37

3.1 Pendekatan Penelitian	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.3 Situasi Sosial	39
3.4 Desain Penelitian.....	40
3.4.1 Fokus Penelitian	41
3.4.2 Data dan Sumber data	42
3.4.3 Penentuan Informan Penelitian	43
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data.....	44
3.5.1 Observasi.....	44
3.5.2 Wawancara	45
3.5.3 Dokumentasi.....	46
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data	47
3.6.1 Triangulasi.....	47
3.7 Teknik Penyajian Data	48
3.7.1 Reduksi data	49
3.7.2 Penyajian Data.....	50
3.7.3 Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan	50
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	51
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember.....	51
4.1.2 Desa Kemiri	55
4.2 Deskripsi Informan Penelitian.....	60
4.3 Hasil Penelitian.....	60
4.3.1 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Kemiri	61
4.3.2 Peranan BUM Desa Kembang Desa Kemiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.....	69
4.3.3 Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemiri Berdasarkan Keadilan Sosial dan Ekonomi.....	86

4.3.4 Hambatan BUM Desa Kembang Desa Kemiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabu Jember.....	90
4.3.4 Matrix Hasil Penelitian	91
BAB 5 PENUTUP	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Kemiri merupakan salah satu desa di kecamatan Panti dengan jumlah masyarakat miskin tertinggi kedua setelah desa Pakis, yaitu sebesar 3.388 penduduk pada tahun 2016. Namun apabila membandingkan antara desa Pakis dan desa Kemiri, adanya BUMDes di desa Kemiri daripada di desa lain dapat disebabkan karena faktor pendukung lainnya, seperti kesadaran masyarakat untuk berorganisasi, adanya potensi di lokasi tersebut dan kualitas SDM di suatu tempat. Dari laporan yang dikeluarkan oleh BPS (2016) menunjukkan hal yang mempengaruhi pemilihan desa Kemiri sebagai desa dengan BUMDes adalah faktor SDM yang cukup memadai.

Hal ini dibuktikan dengan membandingkan jumlah adanya tempat dan sarana pendidikan berupa SD hingga SMA sekaligus tenaga pengajar yang tersedia, desa Pakis menempati urutan terakhir untuk ini (sangat minim dan bahkan tidak terdapat tenaga pengajar dari tingkat SMP di desa ini) sehingga dapat diambil asumsi bahwa SDM di desa Pakis belum memadai untuk terlaksananya BUMDes, sehingga yang menjadi *role model* atau contoh untuk pembuatan BUMDes adalah desa dengan kondisi sosial termiskin kedua di Kecamatan Panti, yakni Desa Kemiri, selain itu adanya potensi desa dalam bentuk ketersediaan sumber air yang perlu untuk dikonservasi lewat adanya BUMDes memperkuat alasan bahwa memang desa Kemiri memerlukan BUMDes. Berikut tabel Jumlah penduduk miskin Kecamatan Panti periode tahun 2016. Tabel 1.1 berikut menggambarkan jumlah penduduk miskin di kecamatan Panti.

Tabel 1.1 Jumlah penduduk Miskin kecamatan Panti Periode tahun 2016.

	Kemuningsari Lor	Glagah Wero	Serut	Panti	Pakis	Suci	Kemiri
Jumlah penduduk	6.601	5.184	12.267	10.603	7.041	11.125	8.775
Jumlah penduduk miskin	1.454	1.641	3.043	3.127	3.380	2.257	3.388
Persentase	22%	31,6%	24,8%	29,4%	48%	20,3%	43,1%

Sumber : Kecamatan dalam Angka, 2017

Tabel diatas menggambarkan jumlah penduduk miskin di kecamatan Panti di tahun 2016. Dapat dilihat bahwa desa kemiri merupakan desa dengan penduduk miskin tertinggi kedua di Kecamatan Panti, dengan rata-rata persentase penduduk miskin, yaitu sebesar 43,1 persen.

Jumlah penduduk miskin yang digambarkan pada tabel 1.1 memiliki hubungan erat dengan mata pencaharian penduduk Desa Kemiri. Tabel 1.2 berikut menggambarkan matapencaharian penduduk desa di Kecamatan Panti tahun 2017.

Tabel 1.2 Mata pencaharian Penduduk di Kecamatan Panti Tahun 2017.

No	Desa	Pertanian	Industri	Konstruksi	Perdagangan	Angkutan	Dll.
1	Kemuningsari Lor	1.560	15	3	104	21	378
2	Glagahwero	967	10	0	507	0	0
3	Serut	10.420	93	347	316	143	72
4	Panti	2.610	2	8	309	7	591
5	Pakis	1.070	7	560	314	15	547
6	Suci	1.887	119	93	14	19	1
7	Kemiri	902	88	12	451	200	985
Jumlah		19.416	334	1.023	2.015	411	2.574

Sumber: Kantor Kecamatan Panti, 2018.

Tabel diatas menggambarkan jumlah penduduk yang bekerja pada bidang-bidang tertentu, baik pertanian, industri, kontruksi, perdagangan, angkutan (transportasi), dan lain-lain (serabutan). Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa diantara desa yang lainnya, matapencaharian penduduk desa kemiri lebih di dominasi oleh pekerja serabutan (lain-lain). Maksud dari matapencaharian lain-lain yaitu terkait pekerjaan seperti buruh tani, kuli bangunan, dan kuli perdagangan. Masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh tani sangat

bergantung pada musim, waktu, dan pemilik sawah. Terkadang, buruh tani harus bekerja sampingan ketika tidak ada pekerjaan di sektor pertanian. Begitu pula dengan kuli bangunan dan kuli perdagangan yang sangat bergantung pada pemilik modal. Maka itu, tiga pekerjaan ini identik dengan pekerjaan tidak tetap atau serabutan.

Terdapat 985 penduduk desa Kemiri memiliki pekerjaan yang tidak menentu atau serabutan. lalu, disusul oleh penduduk bermata pencaharian bidang pertanian sebanyak 902 pekerja. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk Desa Kemiri masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian seperti padi, jagung, dan sayur-mayur. Kemudian peringkat ketiga di ditempati oleh sektor perdagangan sebanyak 451 pekerja. Hingga yang terkecil, yaitu konstruksi sebanyak 12 pekerja.

BUMDes “Kembang” berada di desa Kemiri dan memiliki empat unit usaha yang terdiri dari HIPPAM, pasar desa, kantor pos desa, dan ekonomi kreatif. *Pertama*, awal mula berjalannya BUMDes “Kembang” yaitu dengan menjalankan usaha HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum). Sebelum berdiri dan berjalannya BUMDes “Kembang” Desa Kemiri, masyarakat Desa Kemiri memiliki kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Hal ini karena air di Desa Kemiri sulit di dapatkan. Meski beberapa kali penduduk desa membuat sumur maupun mengebor tanah untuk mendapatkan air, namun tetap tidak di temukan air. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Salama dan ibu Andi selaku penduduk Desa Kemiri.

Sebelum adanya HIPPAM, masyarakat sudah membuat sumur namun tidak keluar air. Lalu membuat galian yang lebih dalam menggunakan alat bor, air juga tidak kunjung keluar. Dari penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa masyarakat desa sebelum adanya Himpunan Penduduk Pemakaian Air Minum (HIPPAM) masih kesulitan dalam mencari air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan tidak adanya sumber air di desa Kemiri. Keterbatasan air bersih di Desa Kemiri menjadikan penduduk Desa Kemiri mencari air bersih di tempat mata air yang cukup jauh. Jaraknya sekitar 3 Km dari Desa Kemiri. Hal ini diungkapkan kepala unit HIPPAM bahwa masyarakat desa masih harus berjalan

kaki ke perkebunan karet untuk mendapatkan air bersih, tepatnya di PTPN perkebunan karet gunung pasang, bahwa masyarakat harus berjalan dengan membawa kendi untuk mengangkut air dari sumber air ke rumah mereka. Hal ini dilakukan setiap hari ketika kebutuhan air rumah tangga habis. Disisi lain, kondisi geografis Desa Kemiri yang tidak di dukung oleh sumber daya alam (air bersih) yang memadai bagi kepentingan masyarakat desa Kemiri menjadikan BUMDes “Kembang” membentuk unit usaha HIPPAM. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih keluarga.

Kedua,tahun berikutnya BUMDes “Kembang” menjalankan pengelolaan retribusi pasar desa. Sebagai fasilitas untuk menjalankan roda perekonomian masyarakat Desa Kemiri dalam memfasilitasi masyarakat baik usaha kecil maupun menengah, penyediaan berupa Los Pasar, lapak pedagang, tempat parkir pengunjung, dengan mengelola iuran dan retribusi bagi pedagang sebagai pemasukan yang nantinya akan dikembalikan kepada pelayanan fasilitas pasar desa. Kegiatan yang dilakukan BUMDes “Kembang” yaitu memungut biaya sewa lapak pedagang dan biaya parkir pelanggan. Pasar desa tersebut hanya digunakan setiap hari Rabu dan hari Minggu. Pengelolaan pasar desa telah di kelola oleh BUMDes “Kembang” sejak tahun 2009 yang awalnya di kelola pemerintah desa. Jadi, dengan adanya pasar desa ini bisa membantu roda perekonomian masyarakat Desa Kemiri.

Ketiga,disamping permasalahan tentang sulitnya mendapatkan air bersih di Desa Kemiri, keterbatasan pelayanan kepada masyarakat berupa pembayaran angsuran BPJS, pengiriman surat, pengiriman barang maupun uang menjadi permasalahan tersendiri bagi penduduk Desa Kemiri karena jarak antara desa ke Kota Jember amat jauh untuk melakukan pembayaran dan pengiriman yang harus dilakukan di kantor pos pusat (Kota). Jarak dari Desa Kemiri ke kantor pos pusat Kabupaten Jember yang cukup jauh, yaitu 16 Km, menjadikan masyarakat kesulitan dalam mengakses kepentingannya untuk melakukan penyetoran dan pengiriman di kantor pos pusat. Maka itu, BUMDes “Kembang” bermitra dengan PT. Pos Indonesia (persero) cabang Jember guna memudahkan masyarakat dalam membayar angsuran maupun pengiriman barang dan uang.

Keempat, setelah ketiga unit usaha tersebut berjalan, BUMDes “Kembang” membantuk unit usaha baru yaitu unit usaha ekonomi kreatif. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri, BUMDes “Kembang” berupaya untuk mencari peluang untuk memberikan stimultan dan peluang kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat, utamanya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan BUMDes dalam bidang ekonomi kreatif ini yaitu mengakomodir kelompok usaha kecil yakni usaha pedagang bajongan (pedagang sayur-mayur) dan pedagang bakso keliling. Sampai saat ini, pedagang bajongan (pedagang sayur-mayur) beranggotakan 50 orang dan pedagang bakso keliling 30 orang. Dan semua pedagang bajongan (pedagang sayur-mayur) dan pedagang bakso keliling memiliki kartu bpjs ketenagakerjaan untuk mejadikan jaminan kerja.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di perdesaan. Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BUMDes menjadi pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Pada prinsipnya pendirian BUMDesa Kembang di Desa Kemiri ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan sebagai lembaga sosial, BUMDesa Kembang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Artinya, aktivitas BUMDes tidak hanya berbicara soal bisnis, tetapi juga mempertimbangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat setempat.

Dengan kekuatan sumberdaya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintahan Desa saat ini, upaya membangun kelembagaan ekonomi Desa yang kuat dan handal menjadi strategis untuk dikembangkan, maka BUMDes dengan wajah baru, manajemen organisasi yang modern dan orientasi usaha yang berbeda pula menjadi penting juga untuk dibentuk. Pendirian BUMDes tentunya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, akan tetapi juga harus berorientasi

pada tujuan pelayanan umum kepada masyarakatnya. BUMDes hanya sebagai alat saja untuk mencapai tujuan besarnya yakni kesejahteraan masyarakat.

Kenapa BUMDes juga harus berorientasi pada pelayanan umum, karena kekayaan aset Desa (melalui penyertaan modal Uang & Aset Fisik) yang akan dikelola oleh BUMDes merupakan satu kesatuan kekayaan / aset Pemerintahan Desa yang di kelola secara terpisah. Semua sumberdaya yang akan dikelola oleh BUMDes harus melalui mekanisme APBDes yang dipisahkan untuk dikelola oleh BUMDes tsbt. Dalam pengelolaan sumber daya permodalan BUMDes, selain dari Pemerintah Desa, masyarakat dan pelaku usaha juga diperbolehkan untuk berinvestasi di BUMDes, baik perorangan maupun kelompok dengan pembagian hasilnya sesuai yang disepakati bersama.

Sebagai lembaga social tersebut telah diwujudkan oleh BUM Desa dalam unit usahanya yaitu pengelolaan HIPPAM berdasarkan kebutuhan air bersih masyarakat Desa Kemiri. Pengelolaan Kantor Pos Desa yang memberikan fasilitas kepada masyarakat Desa Kemiri agar lebih mudah dalam melakukan pengiriman barang. Serta kehadiran pasar ekonomi kreatif desa yang menjadi salah satu tulang punggung perputaran ekonomi desa, yang mana masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli disana.

Desa berdiri sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 19, dijelaskan bahwa kewenangan desa sebagai berikut.

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan aturan Perundang-Undangan di atas, desa sebagai daerah otonom memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah nasional. Poin (b) diatas juga menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri yang berbasis lokal berskala desa. Artinya, pemerintah desa diharapkan lebih sanggup untuk melayani kebutuhan warga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perokonomian di perdesaan adalah melalui pendirian lembaga ekonomi yang di kelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah program dalam meningkatkan kemandirian desa.

Maka itu, dengan adanya BUMDes “Kembang”, dimaksudkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta menggali potensi-potensi yang ada pada individu pekerja, agar dapat bekerja secara mandiri dan memperkuat sektor pertanian, perdagangan dengan program-program yang dijalankan BUMDes “Kembang” seperti HIPPAM (air bersih), pasar desa, pelayanan kantor pos desa Kemiri, dan ekonomi kratif (bajongan).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri. Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)“Kembang” terletak di Desa Kemiri Kecamatan Panti, berdiri sejak tahun 2008, sesuai dengan PERDES No.3 tahun 2007 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kemiri yang mengacu pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat guna menggali potensi yang ada di Desa Kemiri di segala sektor. Dasar pendirian Bumdes “Kembang” Desa Kemiri mengacu pada Permen Dalam Negeri No. 9 Tahun 2014, Perda No.7 tahun 2015, Perbup, Perdes No.3 tahun 2007 dan SK Kepala Desa.

Menurut Rivai (2006:148) peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan

kedudukannya maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut Koenjaraningrat (1989: 169) peran adalah tingkah laku individu yang mementaskan kedudukan tertentu. Jadi, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BUMDes sebagai lembaga formal desa menjalankan suatu peranan tertentu. BUMDes diharapkan dapat melaksanakan peranannya dengan memenuhi hak dan kewajibannya sehingga berfungsi sebagai penggerak ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang di jalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dari segi ekonomi maupun sosial. Peranan BUMDes sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai intrumen kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong Pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, yakni dengan melibatkan masyarakat desa di dalam pengelolaan BUMdes akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa.

Kabupaten Jember memiliki peraturan tentang BUMDes yang diatur dalam Perda Nomor 07 Tahun 2015 Tentang desa. Ditetapkannya Perda tersebut diharapkan pemerintah desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga BUMDes sebagai pengerak perekonomian masyarakat desa dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Kabupaten Jember memiliki 226 desa yang terbagi di 31 kecamatan. Dari 226 desa tersebut hanya 86 desa yang sudah mendirikan BUMDes. Bahkan dari 86 desa yang sudah mempunyai BUMDes tersebut hanya 20 BUMDes yang sudah berjalan aktif, termasuk BUMDes “Kembang” Desa Kemiri. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Jember menjelaskan bahwa di Kabupaten Jember terdapat 226 desa, namun baru terdapat 86 desa yang sudah memiliki Badan Milik Usaha atau BUMDes. Dari total 86 desa ini, baru 20 BUMDes yang sudah berjalan. Salah satu yang menjadi kendala bagi desa untuk menjalankan atau membuat BUMDes adalah persoalan sumber daya manusia.

Badan Usaha Milik Desa merupakan hal baru, yang tentu saja untuk menjalankannya perlu dilakukan pembinaan.

Artinya, ungkapan yang disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menunjukkan bahwa masih banyak BUMDes di Kabupaten Jember yang masih belum berjalan dengan maksimal sehingga dorongan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lamban. Lebih lanjut, kendala yang dialami dalam pelaksanaan BUMDes di Kabupaten Jember, di antaranya yaitu terkait persoalan sumber daya manusia. Kehadiran BUMDes di tiap desa bukanlah tanpa maksud, tetapi justru berupaya untuk mengelola potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat desa. Adanya BUMDes dapat diharapkan untuk menanggulangi kemiskinan dan masalah sosial di desa dapat tertangani dengan maksimal sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan sosial berdasarkan hasil *pre-Conference Working for the 15 International Conference of Social Welfare* (Miftahul Huda, 2009: 73) bahwa kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosial. Di dalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, dan rekreasi budaya. Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa pengertian kesejahteraan sangat umum dan mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat yang mudah dipahami sebagai kondisi.

Lebih lanjut, menurut Zastrow (dalam Miftahul Huda, 2009: 74). mengungkapkan bahwa kesejahteraan sosial pada dasarnya juga dapat dipahami dalam dua konteks yang lain, yakni sebagai sebuah institusi dan sebagai sebuah disiplin akademik. Sebagai institusi, kesejahteraan sosial dapat dipahami sebagai program pelayanan maupun pertolongan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan sebagai sebuah disiplin akademik, kesejahteraan sosial mengacu kepada suatu studi terhadap lembaga, program maupun kebijakan yang fokus pada pelayanan kepada masyarakat. Melihat pada pendapat Zastrow tersebut, tulisan ini lebih mengacu pada kesejahteraan sosial sebagai sebuah disiplin akademik.

Karena berusaha untuk melihat peranan BUMDes "Kembang" Desa Kemiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Maka itu, hadirnya BUMDes "Kembang" sebagai penggerak ekonomi masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa No. 04 Tahun 2015 tentang BUMDes bahwa badan usaha milik desa (BUMDes) seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang di jalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dari segi ekonomi maupun sosial.

Berbagai fakta empiris maupun fakta teoritis yang telah digambarkan diatas merupakan fokus yang akan diteliti dalam tulisan ini. Adapun fokus yang di sorot oleh penulis yaitu berkenaan dengan **"Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) "Kembang" dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember."**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah menurut Sugiyono (2005:31) adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kembang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan tertentu karena akan memberikan arah pelaksanaan suatu penelitian. Menurut Usman dan Akbar (2009:29), tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Sedangkan menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas

Jember (2016:21), tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari deskripsi sementara dari asumsi. Berdasarkan definisi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kembang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember?

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian yang baik harus mampu memberikan manfaat, baik bagi peneliti maupun bagi orang lain. Menurut Wardiyanta (2006:90), manfaat penelitian merupakan ungkapan atau harapan peneliti secara teoritis maupun secara praktis terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:21), manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas. Berdasarkan penjelasan mengenai manfaat penelitian tersebut, dapat dirumuskan beberapa manfaat penelitian yang hendak diwujudkan oleh peneliti sebagai berikut;

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti melalui teori peran pemerintahan daerah yang diterima dibangku kuliah, dan sebagai upaya pemenuhan tugas serta kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Administrasi Negara
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, masyarakat desa dan Pemerintah desa.
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun kontribusi lainnya terhadap pengembangan ilmu administrasi negara, baik bersifat teoritis maupun praktik, khususnya terkait peranana unit usaha desa

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti harus memiliki konsep dasar dalam mengkaji sebuah fenomena. Konsep dasar tersebut dijadikan sebagai alur berfikir yang menjadi pedoman bagi seorang peneliti. Kerangka berfikir penelitian dapat berupa kerangka teoritis yang dapat mendasari pemikiran seseorang peneliti dalam mengupas sebuah permasalahan penelitian untuk dicari jawabannya.

Konsep merupakan interpretasi dari sebuah fenomena. Artinya, konsep memberikan kemudahan dalam menentukan suatu fenomena yang terjadi. Wardiyanta (2006:9) mengemukakan bahwa dalam sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau antara abstraksi dengan realitas. Pendapat lain mengenai konsep dikemukakan oleh Silalahi. Silalahi (2012:112) mengartikan konsep sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu.

Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori-teori mengenai kegiatan publik yang terkait tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Kembang” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Teori harus dipahami oleh setiap peneliti karena teori memiliki peranan dalam ilmu atau penelitian yang berguna bagi peneliti.

Jadi, berbagai definisi peneliti dapat membuat konsep penelitian, yaitu:

- a. Administrasi Publik;
- b. Organisasi Publik
- c. BUMDes
- d. Peranan BUM Desa
- e. Kesejahteraan;

2.1 Administrasi Publik

Administrasi Publik, menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditunjukkan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin suatu ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama bidang organisasi, sumberdaya, manusia dan keuangan.

Istilah *administration of public* menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah. Kemudian istilah *administration of public* menunjukkan konteks yang lebih maju dari pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik. Dalam konteks ini diasumsikan bahwa pemerintah lebih responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun kebutuhan publik merupakan sasaran utama pemerintah, namun pemerintah berupaya memberdayakan publik.

Selanjutnya istilah *administration by public* merupakan suatu konsep yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan untuk hal itu. Dalam hal ini kegiatan pemerintah lebih mengarah kepada “*empowerment*” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus kepada pemerintah. Akibatnya masyarakat dapat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, mulai dari penentuan kebutuhan sampai dengan pelaksanaan dan penilaian hasil, sementara pemerintah lebih memainkan perannya sebagai fasilitator, dan dapat memfokuskan diri pada

urusan-urusan kenegaraan yang sifatnya strategis. Berbagai ulasan tersebut dapat dilihat dari perjalanan paradigme administrasi publik dari *Old Public Administration*, *New Public Administration*, dan *New Public Service*. Penelitian ini menggunakan paradigma *New Public Service*.

2.1.1 *Old Public Management*

Paradigma ini menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik (dikhotomi administrasi publik dengan politik). Negara terlalu memberi peluang bagi para administrator untuk mempraktekkan sistem *napotisme* dan *spoils politics*. Untuk itu diharuskan adanya pemisahan antara dunia legislatif (politik) dengan dunia eksekutif, dimana para legislator hanya merumuskan kebijakan dan para administrator hanya mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan. Sosok birokrasi dalam paradigma ini adalah sejalan dengan jiwa dan semangat bisnis. Menurut Wilson (dalam Keban 2014:244) menuntut agar para administrator publik selalu mengutamakan nilai efisiensi dan ekonomis sehingga harus diangkat berdasarkan kecocokan dan kecakapan dalam bekerja ketimbang keanggotaan atau kedudukan dalam suatu implikasi penting dalam pemerintahan yaitu bahwa prinsip-prinsip dalam dunia bisnis yang diprakarsai oleh Taylor pantas untuk diperhatikan. Metode keilmuan menurut Taylor harus diseleksi dilatih dan dikembangkan secara ilmiah, dan didorong untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah secara ilmiah, dan didorong untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan sesuai prinsip-prinsip keilmuan. Dunia telah mengakui kebesaran Taylor dalam membangun prinsip manajemen yang profesional.

Max Weber juga mengajak untuk melaksanakan prinsip-prinsip Taylor. Menurut Weber ketika masyarakat berkembang semakin kompleks maka diperlukan suatu institusi yang rasional yaitu "birokrasi". Dalam birokrasi ini diatur perilaku yang tidak produktif tetapi juga loyal terhadap pimpinan dan organisasi. Perilaku yang "impersonal" dan "seklek" harus diterapkan. Dalam perkembangannya, doktrin OPA diatas menghadapi masalah. Misalnya, Weber yakin bahwa sosok organisasi birokrasi sangat ideal, padahal dalam

perkembangannya bisa berubah sifatnya menjadi sangat kaku, bertele-tele, dan penuh *red-tape*. Taylor sangat yakin bahwa hanya ada satu cara terbaik (*one best way of doing the task*) untuk melakukan tugas, padahal dalam perkembangan jaman terdapat banyak cara lain untuk bekerja terbaik, hasil rekayasa teknologi dan ilmu pengetahuan (Taylor's fallacy). demikian pula, Wilson cenderung melihat dunia administrasi publik sebagai kegiatan yang tidak bersifat politis, padahal dalam kenyataannya bersifat politis (Wilson's fallacy).

Meski demikian, dari paradigma OPA ini dapat dipelajari bahwa untuk memabangun birokrasi diperlukan profesionalitas, penggunaan prinsip keilmuan, hubungan yang impersonal, penerapan aturan standartisasi secara tegas, sikap yang netral dan perilaku yang mendorong efisiensi dan efektifitas. Berbagai kritik muncul tersebut akhirnya melahirkan paradigma *New Public Management*.

2.1.2 *New Public Management*

Beberapa negara di Afrika telah mengambil manfaat dari NPM Polidano (dalam Keban 2014:246), di negara berkembang, NPM masih bersifat embrio dan coba-coba. Keberhasilan dari NPM sangat tergantung dari konteks dan karakteristik negara yang ditangani, kemampuan institusi, dan koteks dari institusi itu seperti iklim dan ideology manajemen yang dianut, sikap terhadap otoritas, hubungan sosial dan kelompok. Dalam perkembangannya NPM menui banyak kritik karena para elit birokrasi cenderung berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan dirinya daripada kepentingan umum, dan berkolaborasi untuk mencapainya. Apalagi teori dari NPM adalah *public choice* yang sangat didominasi oleh kepentingan pribadi sehingga konsep seperti *pulic spirit*, *public service*, dsb., terabaikan Kamensky (dalam Keban 2014:246). Hal tersebut tidak mendorong proses demokrasi. disamping itu, NPM tidak pernah ditunjuk untuk menangani pemerataan dan masalah keadilan sosial. Munculnya NPM telah mengancam nilai inti sektor publik yaitu *citizen selfgovernance* dan fungsi administrator, bahkan jika tidak berhati-hati akan meningkatkan korupsi dan menciptakan orang miskin (dalam Keban, 2014:247).

Hal penting yang dapat diambil dari NPM adalah pembangunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsive terhadap kebutuhan pelanggan, harus lebih bersifat mengarahkan daripada menjalankan sendiri, harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif, dan menekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wisesusaha, dan pencapaian hasil ketimbang budaya atas asas, orientasi pada proses dan input Rosenbloom, Kravchuck (dalam Keban 2014:247). Dari paparan kelebihan dan kekurangan dari NPM, maka dalam konteks yang lebih maju muncul *New Public Service* yang lebih mengutamakan kepentingan warga negara (*citizen*).

2.1.3 *New Public Service*

Menurut King dan Stivers (dalam Keban, 2014:247) mendesak agar para administrator melibatkan warga masyarakat. Mereka harus bisa melihat masyarakat sebagai warga negara bukan pelanggan sehingga dapat membagi otoritas dan percaya dengan keefektifan kolaborasi. Mereka harus membangun *trust* dan bersikap responsif terhadap kepentingan atau kebutuhan masyarakat, bukan semata mencari efisiensi yang lebih tinggi seperti NPM. Keterlibatan masyarakat harus dilihat sebagai Investasi yang signifikan. Menurut Stewart, et.al (dalam Keban 2014:247) *New Public Service* memandang bahwa tidak ada penonton, semua ikut bermain. Disini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. Paradigma ini juga memandang sebagai sumber energi organisasi di era demokrasi, karena dapat menjamin hak, kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat dan bukan kebutuhan institusi. Konsep *New Public Service* adalah konsep yang menekankan berbagai elemen (Toha, 2008:84). Ide dasar dari konsep ini dibangun dari beberapa teori, diantaranya:

- a. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan. Perlunya pelibatan warganegara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik. Menurut Sandel (dalam Toha, 2008:86) *citizenship* yang demokratis

adalah adanya keterlibatan yang aktif dari warga negara dalam proses pemerintahan. Warga negara tidak hanya melihat dari prespektif individu dalam persoalan yang lebih besar, namun dia melihat persoalan atau prespektif yang lebih luas untuk kepentingan umum, merasa ikut memiliki dan adanya moral *bond* dengan komunitasnya.

- b. Model komunitas dan masyarakat sipil. Akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun *social trust*, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis.
- c. Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru. Administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan (*human beings*) dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan isu-isu sosial lainnya.

Menurut Denhardt&Denhardt (dalam Keban 2014:248) ada tujuh prinsip NPS yang berbeda dari NPM dan OPA. Pertama peran utama dari pelayanan publik adalah membantu warga negara dengan mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama dari pada mencoba mengotorol atau mengendalikan masyarakat ke arah yang lebih baru. Kedua administrasi publik harus menciptakan gagasan yang lebih kolektif yang disetujui bersama yang disebut dengan kepentingan publik. Ketiga kebijakan dan program yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan responsif melalui uaya-upaya kolektif dan proses kolaboratif. Keempat kepentingan publik lebih merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama dari pada agregasi kepentingan pribadi para individu. Kelima para pelayan publik harus memberi perhatian, tidak semata pada pasar, tetapi juga pada aspek hukum dan peraturan perundangan, nilai-nilai masyarakat. Keenam organisasi publik dan jaringan-jaringan yang terlibat akan lebih sukses dalam jangka panjang. Ketujuh kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pelayan-pelayan publik dan warga masyarakat yang berkomitmen memberikan kontribusi terhadap masyarakat, dari pada oleh manager wirausaha yang bertindak seakan akan uang adalah milik mereka.

Menurut Keban (2014:248) dapat di simpulkan paradigma NPS adalah birokrasi harus dibangun agar dapat memberi perhatian kepada masyarakat sebagai warga negara bukan pelanggan. Mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai, standart yang ada dan menghargai masyarakat.

Berdasarkan kutipan di atas, penulis menyimpulkan bahwa administrasi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu Administrasi Keuangan Negara/Publik dan Administrasi Swasta/Niaga. Administrasi Negara adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan urusan negara. Sedangkan Administrasi Niaga adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha/niaga/bisnis.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma *New Public Service* hal ini dikarenakan paradigma ini lebih mementingkan kebutuhan masyarakat, dengan pola implementasi *citizen-centered*. Paradigma NPS sangat menjunjung nilai dan hak masyarakat, disini pemerintah sebagai fasilitator, segala bentuk urusan sebagian diserahkan kepada masyarakat, akibatnya masyarakat memiliki peluang yang banyak dalam partisipasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Seperti pada peranan BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

2.2 Organisasi Publik

Definisi organisasi sangat beragam, selain itu orientasi definisi maupun fokusnya juga berbeda-beda. Mahsun (2006:1) menjelaskan bahwa organisasi sering dipahami sebagai kelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Tidak jauh berbeda dengan definisi diatas, Robbins dan Judge (2008) menyatakan bahwa organisasi adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua individu atau lebih, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Selain itu, Sulistyani (2009:41) menjelaskan definisi organisasi dengan mengklasifikasikan definisi organisasi menjadi tiga, yaitu:

1. Organisasi dipandang sebagai kumpulan orang
2. Organisasi dipandang sebagai proses pembagian kerja
3. Organisasi dipandang sebagai sistem

Dari beberapa definisi organisasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang terkoordinasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Sulistyani (2009:55) memandang organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks. Selain itu, menurut penelaahan peneliti atas penjelasan Mahmudi (2011) dapat terlihat bahwa Mahmudi memandang organisasi publik sebagai instansi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Sedikit berbeda dengan definisi organisasi publik di atas, Mahsun (2006:14) menjelaskan bahwa

“Organisasi publik bukan hanya organisasi sosial, organisasi non profit dan organisasi pemerintah. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai organisasi publik, peneliti menyimpulkan bahwa organisasi publik merupakan organisasi yang menyelenggarakan kebutuhan masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah. Karakteristik organisasi publik berbeda dengan organisasi lain. Konsep „publik“ memiliki makna bahwa organisasi publik memiliki area orientasi pada sektor publik. Sulistyani (2009:54) mengartikan istilah “publik” sebagai pelanggan, yaitu seluruh masyarakat yang dilayani melalui lembaga atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik. Lebih lanjut Sulistyani (2009:55) menjelaskan bahwa

“Organisasi publik sebagai lembaga-lembaga negara, instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang

sifatnya kompleks. Organisasi publik bergerak di lapangan pelayanan publik yang merupakan kewajiban negara, sehingga tidak berkaitan dengan kewajiban mencari laba (non profit oriented).”

Hal ini dipertegas oleh penjelasan Mahsun (2006:6) yang mengatakan bahwa organisasi non profit oriented merupakan organisasi yang bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan Mahsun (2006) merujuk pada suatu kesimpulan bahwa pemerintah merupakan organisasi sektor publik terbesar yang berkewajiban untuk menyediakan barang dan pelayanan publik untuk dinikmati masyarakat secara adil dan merata sebagai bentuk imbalan tidak langsung atas kewajiban membayar pajak yang telah mereka lakukan. Di Indonesia, terdapat organisasi publik yang dibentuk oleh pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari negara hingga desa dengan sebutan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes merupakan organisasi publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat desa melalui tugas-tugas publik yang diembannya

Mahsun (2006:34) menjelaskan bahwa setiap organisasi akan melakukan serangkaian proses manajemen untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Proses manajemen merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem organisasi yang menyeluruh yang mencakup semua aspek operasional organisasi untuk membantu manajemen menjaga keseimbangan atas semua bagian dan mengoperasikan organisasi sebagai suatu kesatuan yang terkoordinasi.

Menurut Mahsun (2006:38) pengukuran kinerja merupakan salah satu instrumen sistem pengendalian manajemen tersebut. Pengukuran kinerja akan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial maupun nonfinansial. Sehingga dapat tercipta sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan. Dengan adanya perbaikan kinerja organisasi publik, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun akan semakin baik pula.

2.2.1 BUMN

Badan Usaha Milik Negara merupakan badanyang dimiliki oleh negara. Pengertian Badan Usaha Milik Negara Secara umum (BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Berdasarkan UU Republik Indonesia No.19 Tahun 2003). BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping badan usaha swasta (BUMS) dan koperasi. BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang dan jasa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN terdapat dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perdagangan serta kontruksi.

Peran penting BUMN pada hakikatnya merupakan pengejawantahan amanat konstitusional yang tertuang pada Pasal 33 UUD 1945. Pasal inimerupakan *entry point* yang diambil para *founding fathers* dalam merumuskanstrategi nasional di bidang ekonomi, yang diarahkan menuju cita-cita luhur yaitu kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Makna yang terkandung dalam pasal ini khususnya pada ayat (2) dan ayat (3) menekankan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang memiliki nilai strategis mutlak adanya dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini mengindikasikan secara jelas bahwa negara akan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi, yang mana dalam tataran praktiknya BUMN memiliki tugas tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.2.2 BUMD

BUMD adalah perusahaan yang di milki dan didirikan oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan Undang-undang No.25 Tahun 2000 yang menyatakan mengenai kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. BUMD (Badan Usaha

Milik Daerah) menjadi sorotan publik, karena BUMD menjadi salah satu faktor penting yang memberikan layanan kepada masyarakat yang tentunya berbeda dengan layanan-layanan masyarakat pada umumnya. Keberadaan dan aktivitas BUMD telah di atur dan di tetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (PD). BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) memiliki peran dan fungsi, yaitu :

- a. Pelaksana kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan daerah
- b. Pemasukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah
- c. Mendorong masyarakat dalam bidang usaha
- d. Memenuhi kebutuhan bagi kepentingan publik, kebutuhan barang maupun jasa.
- e. Menajadi peran untuk kegiatan usaha yang kurang diminati swasta.

Dari peran dan fungsi di atas, BUMD juga memiliki kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah mempunyai harapan terhadap BUMD terutama dalam pencapaian pendapatan sesuai dengan prosedur dan aturan yang sudah di tetapkan. Pemerintah dengan BUMD memiliki hubungan yang sangat erat karena memiliki tujuan bersama untuk saling menjaga dalam perannya masing-masing sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat. Peran dan tanggung jawabnya BUMD sebagai pencetak pendapatan dan pelayanan publik, dalam prakteknya harus berhadapan dengan kondisi yang bergerak secara mekanisme, kondisi kinerja yang mekanisme melalui hubungan pertanggung jawaban kinerjanya oleh publik.

Publik secara luas yang di maksud adalah bagaimana pelayanan publik dapat di kelola secara maksimal dan dapat menerima masukan dari perusahaan swasta yang nantinya akan memposisikan pemerintah pada fungsi dan peran yang sangat di perlukan masyarakat. Namun, pemerintah harus tetap pada konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ketika kalangan swasta mulai tumbuh dan bermunculan pemerintah lah yang mampu memberikan pelayanan secara optimal lebih dari yang di berikan selama ini.

2.3 BUMDes

Melihat definisi yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipastikan guna mengelola berbagai potensi dan usaha yang ada untuk sebesar-besarnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, potensi ini sebagai berikut;

1. Aset: Terdapat berbagai aset yang dimiliki di Desa Kemiri, diantaranya sumber mata air bersih adapun pengelolaan terhadap ketersediaan air bersih ini diwadahi dalam HIPPAM dan dibentuk oleh BUMDes.
2. Jasa Pelayanan: Kantor Pos Desa dikelola oleh BUMDes demi memudahkan warga yang memerlukan pengiriman baik itu berupa surat ataupun barang, selain itu BUMDes Kembang juga menyelenggarakan program pengikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tiap pihak desa yang dipayungi oleh BUMDes mendapatkan berbagai keistimewaan dari keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, hal ini merupakan bentuk jasa pelayanan karena BUMDes juga merupakan salah satu bentuk organisasi publik yang tujuannya bukan hanya untuk perseorangan.
3. Usaha lainnya: Usaha lain yakni Pasar Desa yang dikelola juga oleh BUMDes demi menjaga proses perekonomian warga karena pasar juga dijadikan sebagai tempat untuk menjual hasil bumi warga desa, selain itu terdapat aktivitas ekonomi kreatif warga yang dapat menambah penghasilan sekaligus sebagai wadah kemampuan warga dalam menciptakan hal baru dan memiliki daya jual.

BUMDes sebagai lembaga sosial ekonomi desa harus berjalan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya BUMDes sesuai dengan Permen Desa no 04 tahun 2015 pasal 3 yaitu:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Secara garis besar, tujuan dari pendirian BUMDes “Kembang” adalah sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa. Disamping itu, pendirian BUMDes “Kembang” ini mempunyai sasaran yaitu melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai lembaga sosial ekonomi, BUMDes “Kembang” tentu memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seperti tercantum pada tujuan di bentuknya BUMDes.

Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham modal BUMDes terdiri atas:

- a. Penyertaan modal desa; dan
- b. Penyertaan modal masyarakat desa.

Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa dapat bersumber dari:

- a. Dana segar;
- b. Bantuan pemerintah;
- c. Bantuan pemerintah daerah; dan
- d. Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa.

Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDes disalurkan melalui mekanisme APB Desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:

- a. Memberikan hibah atau akses permodalan;
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Dalam rangka kerjasama antar desa, 2 (dua) desa atau lebih dapat membentuk BUMDes bersama. Pembentukan BUMDes dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes. Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes serta pengelolaan BUMDes tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran BUMDes diatur dengan Peraturan Menteri.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);

- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

(Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Kabupaten Jember memiliki dua perda yang mengatur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Perda tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2007 tentang Keuangan desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2015. Kedua Perda tersebut mendefinisikan BUMDes sebagai suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, yang dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional. Modal BUMDes seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam peraturan desa.

Kedua aturan formal yang dijelaskan diatas dapat diambil bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang berada di level desa, serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai sebuah organisasi, BUMDes tentunya memiliki tujuan yang menjadi acuan dalam menjalankan kebijakan strategis maupun operasional. Melalui tujuan itulah BUMDes diadakan untuk menggapai suatu cita-cita pembangunan di level desa yang lebih baik. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 3 tahun 2007 pasal 28, tujuan BUMDes adalah pertama, terbentuknya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kedua memperoleh keuntungan melalui usaha-usaha desa guna meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dan ketiga memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Setelah BUMDes terbentuk dan menjalankan aktifitasnya sebagai lembaga usaha, kita bisa memahami hasil dari kegiatan usaha yang telah dilaksanakan dan digunakan untuk keperluan apa saja. Meskipun sudah sangat jelas tertera dalam Perda Kabupaten Jember pada pasal 28 tentang tujuan BUMDes. Pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 89 menjelaskan tentang hasil usaha, dari BUMDes digunakan untuk hal yaitu, pengembangan usaha yang ada di

bumdes, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan unruk masyarakat miskin melalui hibah.

Di dalam Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 ditentukan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan.

Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP No. 43/2014, dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015]. Frasa “dapat mendirikan BUMDes” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi. Dari ketentuan tersebut, Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan:

- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. Potensi usaha ekonomi Desa;
- c. Sumber daya alam di Desa;
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
- e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa. Pendirian BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Organisasi pengelola BUMDes paling sedikit terdiri atas:

- a. Penasihat; dan
- b. Pelaksana operasional

Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional merupakan perorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Dari pemaparan diatas, BUMDes mempunyai berbagai fungsi dan manfaat dalam rangka membangun kesejahteraan desa. Untuk BUMDes Kembang di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember ini memiliki keunikan tersendiri. Seperti yang dijelaskan pada latar belakang bahwa BUMDes Kembang memiliki pengaruh terhadap beberapa desa di Kecamatan Panti, seperti untuk pengelolaan ketersediaan air bersih di beberapa desa lewat program HIPPAM, perekonomian masyarakat melalui pasar, dan pengembangan sumber daya manusia melalui kemampuan manajerial masyarakat melalui adanya BUMDes sebagai organisasi.

2.4 Peranan BUMDes

BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha desa memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. (KBBI, 1996;751)

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar mengemukakan definisi peranan sebagai berikut: “Peranan merupakan (role) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya” (Soerjono Soekanto, 2009: 212).

Peranan menurut Gros, Mason dan M.C Eachern yang dikutip dalam buku Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi karangan David Berry adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hal senada juga diungkapkan oleh David Berry, menurutnya didalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu:

1. Harapan-harapan dari masyarakat terdapat pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya (Berry,1995:101).

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan begitu pula sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti, setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu berarti sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batasan-batasan tertentu, dapat meramalkan perbedaan-perbedaan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya, hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan yang mempengaruhi lingkungannya. Menurut Soekamto peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soekamto,2009:213)

Dari penjelasan yang telah diungkapkan tersebut maka indikator peranan adalah:

1. Peraturan, peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui carapedia.com)
2. Konsep, Woodruff mendefinisikan konsep sebagai suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan kompleks, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu. (Woodruff, 1986: 54).
3. Hak dan kewajiban, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). (KBBI, 1996:541, 629)

Didalam interaksi sosial kadang kala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa dianggap

proses interaksi tersebut kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa satu pihak mempunyai hak saja sedangkan pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan seseorang atau sekelompok masyarakat harus menjalankan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya.

Definisi BUM Desa menurut Maryunani (2008:35), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUM Desa adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa. Jadi pemerintah desa sebagai fasilitator dapat membentuk suatu kelompok kerja dalam mengoperasionalkan kegiatan BUM Desa tersebut. Lalu tujuan didirikanya BUM Desa adalah dalam rangka memperkuat perekonomian desa yang dalam arti detail adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas penghidupan masyarakat desa tersebut, yang ditinjau dari segiekonomi desa.

Pendirian dan pengelolaan BUMDES merupakan suatu perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang dapat menjadikan pengelolaan BUMDES tersebut berjalan secara profesional, efektif, efisien, dan mandiri. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, harus dilakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara produktif maupun konsumtif melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diusahakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDES merupakan lembaga usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan roda perekonomian desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku dalam

standar pasar. Artinya, terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang telah disepakati bersama.

BUMDES merupakan sarana untuk menjalankan usaha pelayanan ekonomi di desa, yang meliputi jenis usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, penyaluran sembilan bahan pokok (sembako) ekonomi desa, perdagangan hasil pertanian meliputi perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis, serta industri dan kerajinan rakyat.

Selanjutnya Ade Eka Kurniawan (2015) menjelaskan bahwa BUMDES memiliki fungsi antara lain:

1. Sebagai motivator, artinya BUMDES dapat memotivasi masyarakatnya untuk memberi masukan tentang kelanjutan desa kedepan.
2. Sebagai fasilitator, artinya BUMDES yang memfasilitasi segala aktivitas program pembangunan.
3. Sebagai mediator, artinya BUMDES yang mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana usaha yang telah ditetapkan. Selain itu BUMDES sebagai mediator juga berarti BUMDES dapat membantu pemerintah desa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa tanpa memutuskan masalah tersebut.
4. Sebagai stabilisator, artinya BUMDES berperan sebagai penyeimbang harga kebutuhan yang dijadikan usaha pembangunan.

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *free-rider* yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek *rente* Nurcholis (2011: 88).

Melihat posisi badan usaha milik desa ini dalam menghadapi realitas arus desak intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, disamping itu badan usaha milik desa ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta bermodal besar maka posisi badan usaha milik desa ini tak dapat dibandingkan. Dengan sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran badan usaha milik desa ini sendiri akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Diharapkan badan usaha milik desa ini mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa, dan sebagai perusahaan desa.

2.5 Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan tidak merujuk pada suatu kondisi yang baku dan tetap. Istilah ini dapat berubah-ubah karena ukuran sejahtera atau tidak sejahtera kadang-kadang berbeda antara satu ahli dengan ahli lainnya. Kondisi sejahtera dari seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat disesuaikan dengan sudut pandang yang di pakai. Dalam batas ini kesejahteraan sangat sulit untuk didefinisikan. Mesti begitu, bukan berarti kesejahteraan tidak dapat di definisikan. Kesejahteraan sangat penting untuk didefinisikan sebab menyangkut pokok pembicaraan pekerjaan sosial yakni yang mengupayakan kesejahteraan suatu masyarakat.

Memahami kesejahteraan, tidak cukup dilihat secara individu, terutama pemenuhan kebutuhan fisik setiap warga negara, akan tetapi juga dilihat dari susasana kehidupan bermasyarakat yang merupakan hasil relasi antar-individu. Kesemuanya itu akan menentukan suasana dalam kehidupan sosial.

Konsep kesejahteraan menurut Soetomo (2014:47) dapat di konsepkan sebagai kondisi tata tentrem kerta raharja. Bila dicermati mengandung unsur atau komponen, ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, dan kemakmuran. Kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensinya. Konsep tentrem lebih menggambarkan dimensi sosiologis dan psikologis dalam

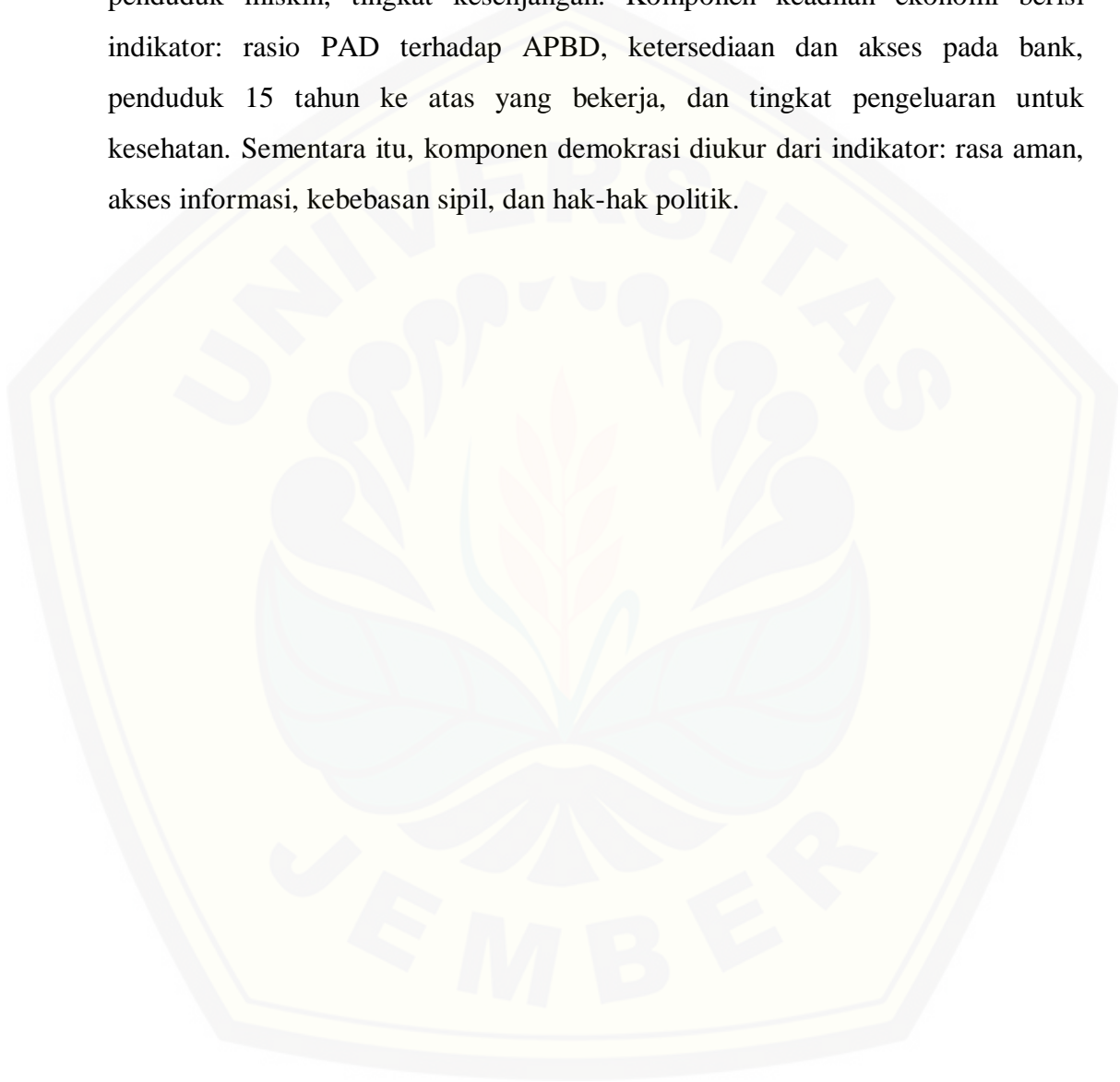
kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, dan bebas dari rasa takut. Sementara komponen kemakmuran lebih bernuansa ekonomik. Konsep kerta lebih menggambarkan aktifitas dan dinamika yang didukung oleh adanya etos, iklim yang kondusif dan terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri. Kesemuanya itu akan menghasilkan konduksi kehidupan raharja yang mencerminkan kemakmuran.

Lebih lanjut Soetomo mengungkapkan ukuran kesejahteraan yang digagas oleh Negara, yaitu oleh Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra). Konsep indeks kesejahteraan rakyat mengandung tiga komponen, yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi dan demokrasi. Keadialan sosial mengandung sejumlah ukuran atau dimensi, yakni: akses pada listrik, rata-rata lama sekolah, akses pada kesehatan, rekreasi-olahraga-seni, jaminan sosial, penduduk yang tidak mencapai usia 40 tahun, akses pada air bersih, akses pada sanitasi, jumlah penduduk miskin, tingkat kesenjangan. Komponen keadilan ekonomi berisi; rasio PAD terhadap APBD, ketersediaan dan akses pada bank, penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, penduduk yang memiliki rumah, perbandingan pengeluaran penduduk dengan garis kemiskinan, tingkat pengeluaran untuk kesahatan. Sementara itu, komponen demokrasi diukur dari indikator: rasa aman, akses informasi, kebebasan sipil, hak-hak politik, lembaga demokrasi.

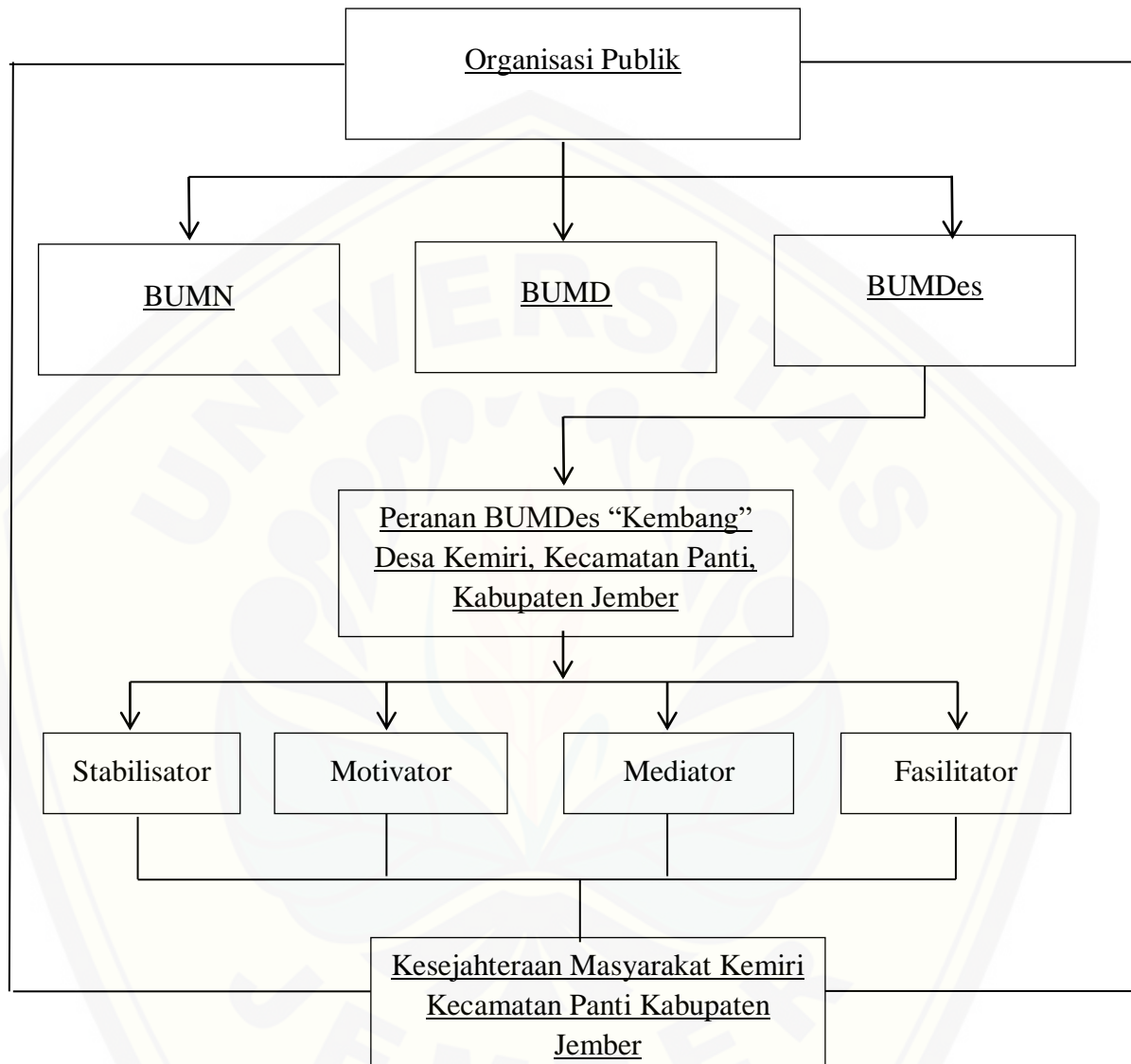
Pemerintah bertanggung jawab akan kesejahteraan warga negaranya, dimana mereka seharusnya menyediakan berbagai layanan untuk mengangkat kesejahteraan. Badan Usaha Milik Desa biasa disingkat BUMDes merupakan salah satu program layanan yang disediakan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan desa. BUMDes sebagai lembaga sosial dan komersil menggemban tugas untuk meningkatkan standar hidup masyarakat desa, sehingga nantinya masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam hal ini, teori tersebut sangat relevan dengan kondisi masyarakat desa kemiri yang memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa yang dikelola oleh BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan dalam penelitian ini menggunakan indikator kesejahteraan yang diKembangkan Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko

Kesra) yang ditulis oleh Soetomo (2014: 48) bahwa kesejahteraan rakyat mengandung tiga komponen, yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi dan demokrasi. Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: akses pada kesehatan, jaminan sosial, akses pada air bersih, akses pada sanitasi, jumlah penduduk miskin, tingkat kesenjangan. Komponen keadilan ekonomi berisi indikator: rasio PAD terhadap APBD, ketersediaan dan akses pada bank, penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, dan tingkat pengeluaran untuk kesehatan. Sementara itu, komponen demokrasi diukur dari indikator: rasa aman, akses informasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik.



2.6 Kerangka Berpikir



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2015:2). Silalahi (2012:6) juga menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dianggap reliabel dan efisien karena pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui metode ilmiah tersebut dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka baik oleh diri sendiri peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Definisi metode ilmiah oleh Usman dan Akbar (2009:41) adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk itu jawaban atas pertanyaan penelitian sangat tergantung pada metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas kebenaran sebuah ilmu pengetahuan. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Pada metode penelitian terdapat teknik-teknik yang bisa digunakan bagi peneliti untuk mengkaji proses penelitiannya tersebut, meliputi;

- a. Pendekatan penelitian;
- b. Tempat dan Waktu Penelitian;
- c. Situasi Sosial;
- d. Desain Penelitian;
- e. Teknik dan Alat Perolehan Data;
- f. Teknik Menguji Keabsahan Data;
- g. Teknik Penyajian Data

3.1 Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan uraian pada latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti (Idrus, 2009:24). Sesuai penjelasan tersebut diatas, penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Kembang” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Bagian ini dipaparkan di mana penelitian tersebut dilaksanakan dan kapan penelitian dimulai serta berakhir. Tempat dan waktu penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu dari variabel-variabel yang diteliti. Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Penelitian yang dipengaruhi oleh tempat dan waktu, perlu deskripsi lengkap tentang tempat dan waktu yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian.

Tempat penelitian merupakan lokasi atau daerah yang diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Waktu penelitian ini dilakukan pada Maret sampai dengan April 2020.

3.3 Situasi Sosial

Penelitian kualitatif menggunakan istilah situasi sosial. Dalam buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah universitas jember (2016:52) disebutkan bahwa pada bagian ini terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Menurut Sugiyono (2009:390), penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransfer ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Berdasarkan pengertian diatas, elemen situasi sosial yang berinteraksi secara sinergis sebagai berikut.

a. Tempat;

Lokasi utama yang diambil oleh peneliti sebagai tempat penelitian adalah Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. ada beberapa tempat yang akan digunakan untk dapat menggai informasi mengenai permasalahan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut;

- b. Kantor Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
- c. Kantor BUMDes Kembang Desa Kemiri.
- d. Kantor pos Desa Kemiri.
- e. Pasar Desa Kemiri

b. Pelaku (*Actor*);

Interaksi pelaku/aktor dalam kegiatan penelitian kualitatif perlu dicermati dengan baik sebab dari sinilah peneliti akan memperoleh data yang diharapkan dapat menjawab masalah yang tengah dipecahkannya. Interaksi aktor atau subjek penelitian menurut Amirin (dalam Idrus, 2009:91) merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Istilah subjek penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Penelitian ini pelaku (*actor*) yang terlibat yaitu:

- a) KepalaDesa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
 - b) Ketua BUMDes “Kembang” Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember
 - c) Kepala unit BUMDes “Kembang” dalam bidang pasar desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
 - d) Masyarakat Desa Kemiri di Dusun Kantong, Delima, Krajan, Sodong, Tenggiling dan Danci sebagai pengguna Hippam, Pasar Desa, Kantor Pos Desa, Ekonomi Kreatif (Bajongan).
- c. Aktifitas atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut ;
- a) Aktivitas pengurus BUMDes Kembang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
 - b) Aktivitas di kantor pos Desa kemiri.
 - c) Aktivitas di pasar desa Kemiri.

Namun tidak menutup kemungkinan apabila dalam proses penelitian nanti masih dibutuhkan aktivitas-aktivitas lain yang perlu untuk diteliti, sehingga menyesuaikan kebutuhan dilapangan.

3.4 Desain Penelitian

Silalahi (2012:22) mengemukakan bahwa tidak ada penelitian yang hanya menggunakan satu jenis penelitian tunggal. Jenis penelitian pun beragam menurut klasifikasi jenis penelitian dari para ahli metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:8) metode penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu metode penelitian naturalistic karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Selain itu penelitian kualitatif menurut Sudjana (1991:7) adalah proses berpikir secara induktif yang tidak dimulai dengan teori yang bersifat umum melainkan dari proses pengamatan. Pada penelitian kualitatif bentuk desain penelitian dimungkinkan sesuai dengan bentuk alami penelitian kualitatif itu sendiri yang mempunyai sifat *emergent* dimana fenomena muncul sesuai dengan prinsip alami yaitu fenomena apa yang adanya sesuai dengan yang dijumpai oleh seorang peneliti dalam proses penelitian di lapangan. Moloeng (2012:168) menjelaskan bahwa kedudukan peneliti dalam

penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pelapor penelitian. Berdasar dua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen penelitian.

Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif jika ditinjau dari tujuan penelitian. Arikunto (dalam Prastowo, 2012:111) menjelaskan pula bahwa metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variable, gejala, atau keadaan objek penelitian. Sesuai dengan pengertian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Kembang” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

3.4.1 Fokus Penelitian

Fungsi *human instrument* selanjutnya yaitu menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Menurut Idrus (2009:42) dari fokus penelitian, peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan penelitian yang akan ditelitinya. Fokus penelitian sangat penting dijadikan sarana untuk memadukan dan mengarahkan jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus penelitian, maka peneliti membatasi bidang-bidang temuan dengan arahan fokus penelitian, sehingga peneliti mengetahui dengan pasti data mana yang perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif sebagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini memfokuskan pada peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Kembang” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

3.4.2 Data dan Sumber data

Sebuah penelitian, data memegang peranan penting sebagai suatu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan pengertian sumber data adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai setting, berbagai cara dan sumber. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.

a. Data Primer

Sumber Primer sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer sangat penting dalam penelitian karena merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Berdasarkan pengertian tersebut data primer dalam penelitian ini yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Kembang”, dalam menjalankan peranannya. Sedangkan, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut, termasuk masyarakat di Desa Kemiri.

b. Data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data yang telah terbentuk dalam dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Data sekunder dapat berupa dokumen, catatan, laporan, majalah ilmiah, makalah, karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan. Begitu pula pada keadaan semestinya yaitu

sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat dalam Profil desa Kemiri, RPJMD, Peraturan Desa Kemiri, dan data-data dari Kecamatan Panti.

3.4.3 Penentuan Informan Penelitian

Istilah informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2011:221) seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri, yaitu:

- a. mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
- b. berkecimpung dalam masalah yang sedang diteliti;
- c. memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai; dan
- d. mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) seorang informan harus menguasai dan memahami objek penelitian yang mampu menjelaskan secara jelas dan rinci terkait masalah penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang diusung peneliti, penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Silalahi (2012:272) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti.

Bedasarkan definisi informan dan melihat situasi sosial di atas, peneliti menentukan sejumlah informan yang menilai peneliti memenuhi kriteria atau ciri-

ciri sebagai informan yang dapat diminta informasi terkait Peranan BUMDes “Kembang” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

- a. KepalaDesa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
- b. Ketua BUMDes “Kembang” Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember
- c. Kepala unit BUMDes “Kembang” dalam bidang pasar desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
- d. Masyarakat Desa Kemiri di Dusun Kantong, Delima, Krajan, Sodong, Tenggiling dan Danci sebagai pengguna Hippiam, Pasar Desa, Kantor Pos Desa dan Ekonomi Kreatif (bajongan).

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24), teknik dan alat perolehan data ialah uraian yang menjelaskan cara dan instrument yang digunakan untuk memperoleh data. Lebih lanjut, berdasarkan buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (2016:53) terdapat teknik pengumpulan data, yaitu observasi, dokumentasi, wawancara. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, draf wawancara, dan alat elektronik. Teknik dan alat pengumpulan digunakan dalam penelitian untuk menggali data-data relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai teknik pengumpulan tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang akan dijabarkan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Nasution (dalam Sugiyono, 2015:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Idrus (2009:101) menyatakan observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Menurut Usman dan Akbar (2009:52) observasi merupakan usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan teknik observasi membutuhkan kecermatan dan daya

ingat yang kuat dalam pengamatan sehingga diperoleh data-data yang relevan. Untuk membantu teknik observasi ini Usman dan Akbar (2009:54) menyebutkan diperlukannya alat bantu observasi yaitu daftar riwayat kelakuan, catatan berkala, daftar catatan, alat elektronik seperti kamera dan alat perekam. Jenis-jenis teknik observasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) terdiri dari tiga yaitu:

- a. Partisipasi atau lawannya nonpartisipasi;
- b. Sistematis atau lawannya nonsistematis; dan
- c. Eksperimental atau lawannya non eksperimental

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipasi. Pengertian teknik observasi non partisipasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang *observer* tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Peneliti dalam penelitian ini mengamati secara langsung peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Kembang” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

3.5.2 Wawancara

Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti. Menurut Usman dan Akbar (2009:55) manfaat penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya serta untuk menguji data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data lainnya. Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

Sugiyono (2011:233) membagi wawancara kedalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak terstruktur. Berdasarkan tiga kategori tersebut, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Peneliti dalam melakukan wawancara semiterstruktur dapat melakukan proses tanya jawab dengan informan yang akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka topik penelitian tersebut. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam, dan alat tulis sebelum dilangsungkan wawancara.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2009:69) merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk sekunder. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moelong (2014:217) adalah untuk menguji, menafsirka dan bahkan untuk meramalkan. Guba dan Lincoln (dalam Moelong, 2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

- a. Dokumen merupakan sumberdaya yang stabil, kaya dan mendorong;
- b. Berguna sebagai sutu bukti untuk penelitian; dan
- c. Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks,

Penelitian ini memerlukan beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi foto-foto terkait wawancara dan foto-foto yang terkait dengan peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Kembang” dalam meningkatkan kesejahteraan milik desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Tahap akhir dari pengolahan data dari penelitian yang telah diteliti adalah menguji keabsahan data yang diperolehnya dan juga kevalidan data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sehingga perlu metode untuk menguji apakah data yang diperoleh sama dan memang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Moelong (2014:320) bahwa pengujian terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Berbagai teknik pengujian keabsahan data yang harus peneliti pelajari untuk membuktikan dan mempertanggung jawabkan hasil penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data berikut ini.

Tabel 3. 1 teknik pemeriksaan keabsahan data

Kriteria	Teknik Pengujian Keabsahan Data
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikut-sertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik pengujian keabsahan data diatas, peneliti ini menggunakan teknik pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi sebagai berikut.

3.6.1 Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan triangulasi peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data; dan

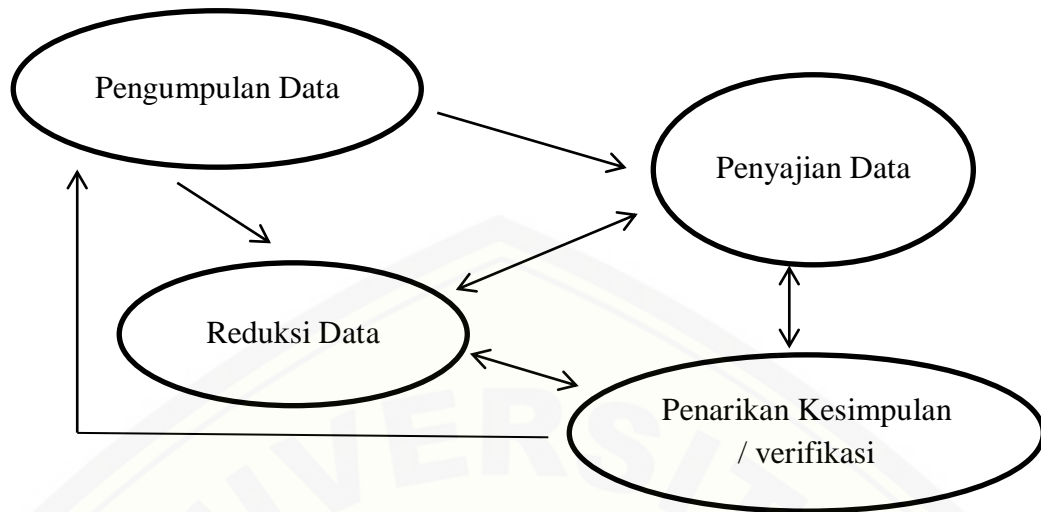
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mencocokkan data-data yang diperoleh. Seperti mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara salah satu informan dengan data yang diperoleh dari informan lain, atau mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi maupun hasil dokumentasi.

3.7 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian (*display*) menurut Usman dan Akbar (2009:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut. Sedangkan menurut Wardiyanta (2006:37) penyajian data merupakan upaya penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Secara umum teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Penggolongan teknis analisis data ini dilakukan berdasarkan data yang menjadi bahan analisis dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Memperhatikan definisi analisis data diatas, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:246), megemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berslangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles da Huberman aktifitas dalm analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusiondrawing/verification*



Gambar 3.1 Komponen Analisis data Kualitatif

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:247).

3.7.1 Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Menurut Sugiyono (2015:247) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila diperlukan. dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan. Sedangkan menurut Silalahi (2012:304) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data terhadap hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti yaitu selama proses pengumpulan data.

3.7.2 Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:249) yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:249) selanjutnya disarankan dalam melakukan display data selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Peneliti dalam penelitian ini menyajikan data dalam bentuk uraian kata-kata atau narasi, bagam, flowchart, tabel dan gambar. Hal tersebut dilakukan agar peneliti maupun pembaca dapat memahami informasi secara mudah dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3.7.3 Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan data dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan megumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember dapat dikatakan sudah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri, meskipun masih ada beberapa hambatan. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember dapat dilihat dari beberapa indikator yang menjadi alat ukur dari sebuah penelitian ini, adapun indikatornya sebagai berikut:

- a. Peranan BUMDes sebagai Fasilitator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri sudah bisa dikatakan baik dan aktif dalam hal perencanaan dan memfasilitasi segala usaha yang dibangun di Desa Kemiri itu sendiri. Hal ini diwujudkan dengan adanya penyediaan modal usaha yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional BUMDes Kembang.
- b. Peranan BUMDes Kembang sebagai mediator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri diwujudkan dengan pengelolaan potensi desa dalam wujud usaha BUMDes.
- c. Peranan BUMDes Kembang sebagai motivator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri sudah baik. Dalam hal ini BUMDes Kembang mendorong penuh peningkatan pendapatan Desa Kemiri. Salah satunya diwujudkan dengan setiap bulannya berkontribusi 25 % untuk kas desa.
- d. Peranan BUMDes Kembang sebagai stabilisator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri sudah baik. Hal ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Kemiri seperti pemberian pelayanan HIPPAM dan kantor pos desa.
- e. BUMDes Kembang dalam upaya mensejahterakan masyarakat Desa Kemiri masih menemui beberapa hambatan seperti pengelolaan

administrasi belum dikelola dengan baik, selain itu kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para lembaga desa menjadi hambatan dalam mensejahterakan masyarakat Desa Kemiri.

5.2 Saran

Kesimpulan di atas memberi gambaran tentang peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peningkatan peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri yang lebih baik. Beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengingat salah satu dari tujuan dibentuknya BUM Desa adalah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Maka perspektif keuangan merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam BUM Desa Kemiri.
2. BUMDes Kembang diharapkan mampu meningkatkan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat kedepannya.
3. Meningkatkan komunikasi dan sosialisasi hal ini diakrenakan keduanya merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh BUMDes. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi memunculkan ketidakpercayaan warga kepada kemampuan pengelola dalam pengelolaan BUMDes. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi ini memunculkan tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Ambar, T Sulistiyani. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. . Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Pers.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Koentjaraningrat. 1989. *Pengantar Ilmu Antropologi* .Jakarta: Bumi Aksara
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*,. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Maryunani.2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Miftahul Huda. 2009. *Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kalitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditma.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.

- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2013. *Sosologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetomo. 2014 *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjana. 1991. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&DI*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu, Tandjung, Modeong. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Thoha, Miftah. 1997. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Mifta. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Alfabeta.
- Usman, Husaini dan Akbar, P. S. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Lembaga

- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kecamatan Panti Dalam Angka 2017*. Kabupaten Jember: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kecamatan Panti Dalam Angka 2018*. Kabupaten Jember: Badan Pusat Statistik
- Profile Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Malang: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Universitas Jember. 2016 *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember Universiti Press.

Peraturan, Undang-Undang

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2010.

Permen Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Desa Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

SK Kepala Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Lembaga

Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2015. *Pengembangan Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Universitas Jember. 2016*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.

Internet

<http://www.kissfmjember.com/2017/03/22/baru-10-persen-desa-di-jember-miliki-bumdes.html> diakses 6 Februari 2018, pukul 20:15

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://jemberkab.bps.go.id/>

LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan !

1. Bagaimana sejarah berdirinya BUM Desa Kembang?
2. Apakah Visi dan Misi BUM Desa Kembang?
3. Ada berapa unit usaha yang dimiliki oleh BUM Desa Kembang?
4. Bagaimana sejarah awal berdirinya BUM Desa Kembang di Desa Kemiri ini?
5. Tujuan awal didirikannya BUM Desa itu apa?
6. Apakah ada peraturan khusus dari Desa yang mengatur mengenai BUM Desa?
7. Apa yang anda ketahui tentang BUM Desa Kembang di Desa Kemiri ini?
8. Sejak Kapan BUM Desa ini berdiri?
9. Fasilitas apa saja yang telah diberikan BUM Desa untuk mensejahterakan masyarakat Desa Kemiri?
10. Apa saja unit usaha yang dijalankan oleh BUM Desa Kembang ?
11. Sebagai mediator, hal-hal apa sajakah yang disampaikan oleh BUMDesa kepada masyarakat?
12. Apakah masyarakat diajak bersama untuk membahas unit usaha apa yang akan dijalankan?
13. Bagaimana system pelaporan atau pertanggungjawaban kegiatan BUM Desa?
14. Bagaimana mengenai keterlibatan/partisipasi masyarakat terhadap kegiatan (program) BUM Desa?
15. Bagaimana kontribusi BUMDes terhadap PAD sejauh ini?
16. Bagaimana respon masyarakat Desa Kemiri terhadap adanya BUM Desa Kembang ini?
17. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan BUM Desadalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri?
18. Modal BUM Desa sepenuhnya berasal dari penyertaan APB Desa untuk pertanggungjawabanya itu bagaimana sistemnya?
19. Kerjasama yang sudah dilakukan BUM Desa ini dengan pihak mana saja?

20. Adakah agenda rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama badan pengawas untuk melakukan evaluasi terhadap BUM Desa?
21. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengembangan unit usaha BUM Desa ini ?
22. Harapan kedepan untuk BUM Desa Kembang dan unit usahanya?



